



tanggal : 22-5-2017 Halaman : 1

Harapan Warga Sangat Tinggi Haryadi dan Hasto Harus Buktikan Diri

YOGYA (KR) - Pelantikan Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti dan wakilnya Heroe Purwadi serta Bupati Kulonprogo dr H Hasto Wardoyo SpOG(K) dan wakilnya Drs H Sutedjo, Senin (22/5) hari ini di Kepatihan, memunculkan ekspektasi sangat tinggi dari warga, karena Haryadi dan Hasto adalah pejabat petahana (*incumbent*). Di masa jabatan yang kedua inilah mereka harus membuktikan kerja keras yang sistematis bagi warga Kota Yogya dan Kulonprogo.

Menurut Guru Besar Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik, Fisipol UGM

Prof Wahyudi Kumorotomo PhD, masalah ketimpangan kesejahteraan antara kaya-miskin menjadi tantangan utama dalam 5 tahun ke depan. Masalah ini menyeluruh bagi semua wilayah di DIY karena Indeks Gini yang sangat tinggi (0,43) dalam ukuran nasional. Dilema kebijakan yang harus dihadapi adalah bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi seperti yang tercatat di dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) seringkali disertai dengan efek ketimpangan yang tinggi pula. "Karena itu, pertumbuhan ekonomi harus disertai dengan upaya yang serius untuk menciptakan lapangan kerja, mengalokasikan anggaran yang lebih fokus pada kelompok miskin dan memeratakan pendapatan masyarakat melalui banyak kebijakan sosial," terang Wahyudi kepada KR, Minggu (21/5).

Untuk wilayah kota Yogya, kementerian Haryadi-Heroe yang relatif tipis atas pesaingnya, menjadi koreksi bagi Haryadi untuk melihat kepuasan warga terhadap kinerja selama ini. Oleh sebab itu, tantangan legitimasi kebijakan untuk masa jabatan yang kedua adalah membuktikan tentang komitmen dan keberpihakan pada masyarakat, terutama golongan menengah ke bawah.

Sedangkan soal keterbukaan informasi, menurut Wahyudi sudah relatif terjaga. Tetapi dari sisi kinerja pelayanan publik tampaknya masih banyak PR untuk Haryadi. Efisiensi dan efektivitas pelayanan publik cenderung stagnan pada masa jabatan sebelumnya. Kontak antara Pemda dan warga yang dibantu Unit Pelayanan Informasi dan Keluhan (UPIK) belakangan cenderung melemah karena warga kurang lagi antusias untuk menyampaikan keluhan, karena toh tidak ditindaklanjuti dengan kebijakan yang responsif.

Demikian pula, kecenderungan bahwa Pemkot hanya mengutamakan investor (terutama hotel, apartemen, restoran) tanpa memperhatikan pemerataan pendapatan masyarakat, hendaknya dapat ditanggapi dengan langkah-langkah kebijakan yang

*** Bersambung hal 8 kol 1**

Haryadi Sambungan hal 1

konkret dari Haryadi-Heroe. "Pembangunan hotel dan apartemen yang masif sudah memunculkan dampak nyata, antara lain kesulitan warga memperoleh air bersih, konflik antara warga dengan investor, serta hilangnya ciri khas Yogya sebagai kota budaya," ujar Wahyudi.

Keberpihakan kepada warga miskin, pengembangan ekonomi kreatif, penciptaan lapangan kerja yang luas, prioritas pada ruang terbuka hijau adalah sebagian dari tantangan Pemkot Yogya saat ini. Target RPJMD 2012-2016 untuk mengurangi kemiskinan menjadi sekitar 8,4 persen ternyata meleset, karena saat ini angkanya masih sebesar 8,75 persen.

Terdapat Halili MA, Pengajar Politik di Universitas Negeri Yogyakarta dan Peneliti di Setara Institute for Democracy and Peace mengatakan, salah satu penyebab tingginya ketimpangan di DIY adalah ketidakmerataan akses atas sumber daya, khususnya sumber daya ekonomi. "Oleh karena itu pekerjaan rumah terbesar walikota dan bupati terpilih adalah memastikan bahwa seluruh warga memiliki akses setara, tidak harus sama, atas akses ekonomi," katanya. Singkatnya, tanpa intervensi pemimpin sebenarnya kota sudah bergerak secara auto-pilot. Tapi akselerasi dan transformasi kota, tentu tidak bisa dibangun dari autopilotisme tersebut.

(Dev)-a



Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 16 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005